



PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2017

Tematik Pemerintahan



Outline :

1. Pendahuluan
2. Potensi dan Permasalahan Bidang Pemerintahan
3. Tematik Pembangunan Bidang Pemerintahan
4. Arah Kebijakan Pembangunan DIY
5. Strategi Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Tematik
6. Pendekatan Lintas sektor dan Lintas SKPD
7. Aspek Kewilayahan yang Fokus Pada Kemiskinan dan Infrastruktur





GRAFIK CAPAIAN IKU GUBERNUR 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prosentase Capaian	Keterangan
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budayameningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelesatarian budaya	102.62	Tercapai
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka melek huruf	100.63	Tercapai
3	Aksesbilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	81.85	Tidak Tercapai
4	Daya saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	100.00	Tercapai
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	100.93	Tercapai
6	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita pertahun	91.03	Tidak Tercapai
7	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	99.69	Tidak Tercapai
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	51.62	Tidak Tercapai
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	108.79	Tercapai
		jumlah wisatawan mancanegara	111.89	Tercapai



GRAFIK CAPAIAN IKU GUBERNUR 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prosentase Capaian	Keterangan
10	Lama tinggal nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara	80.43	Tidak Tercapai
		Lama tinggal wisatawan mancanegara	88.09	Tidak Tercapai
11	Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA, 2=A, 3=B, 4=CC, 5=C, 6=D)	100.00	Tercapai
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1, WDP=2, Disclaimer=3)	100.00	Tercapai
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan	101.24	Tercapai
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	97.24	Tidak Tercapai
15	Pemanfaatan ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	100.17	Tercapai

Domain Bidang Pemerintahan

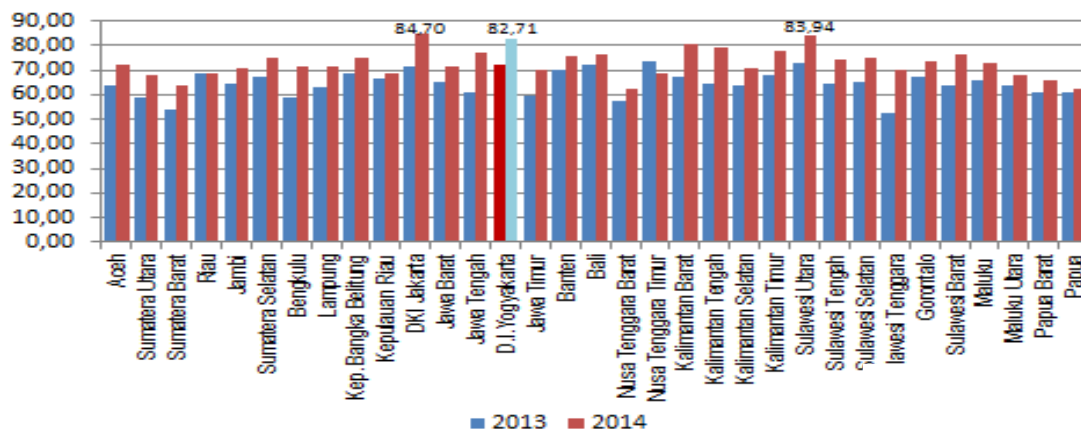
TEMATIK BERDASARKAN ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pendalaman Penghayatan Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia DIY, Dinamika Politik dan Keamanan, serta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik)
2. Reformasi Birokrasi (Khususnya Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan)
3. Kebencanaan (Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan Kapasitas)
4. Kependudukan (Konsolidasi Tertib Administrasi Kependudukan, Utilisasi Data/Dokumen Kependudukan dalam Pelayanan Publik)



PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DIY (HASIL IDI DIY)

Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi 2013-2014

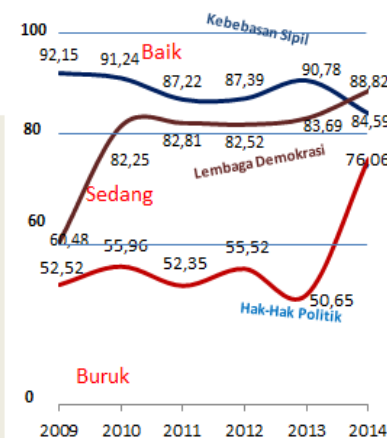


Perkembangan IDI DIY menurut aspek 2009-2014

Kebebasan Sipil lebih tinggi dibandingkan pemenuhan Hak-Hak Politik
 Kebebasan Sipil **Cenderung Berfluktuasi**.
 Hak-hak Politik **Cenderung Meningkat**

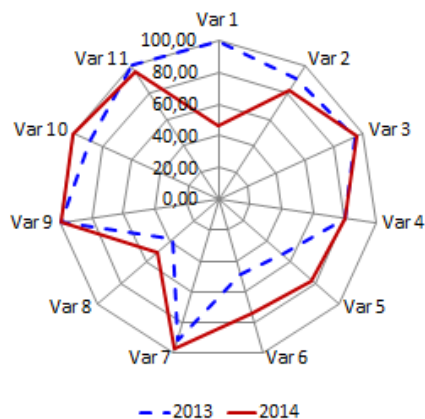
Lembaga Demokrasi **Cenderung Meningkat**

Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik tidak sepenuhnya dalam kendali pemerintah/pemerintah daerah



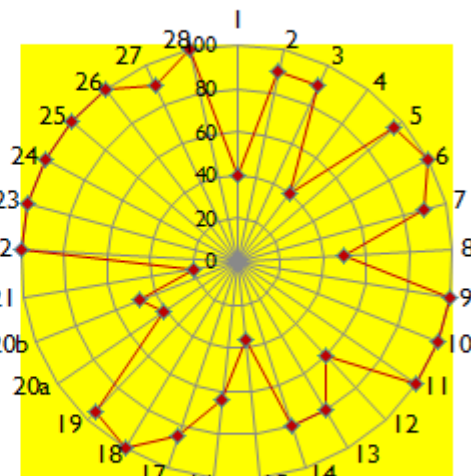
Indikator Rendah IDI DIY 2014

Perkembangan Variabel IDI DIY 2013-2014



- IDI 2012 = 72,96;
- IDI 2013 = 72,36;
- IDI 2014 = 82,71
- Kondisi yang harus menjadi perhatian pada variabel: 1, 5, 6, dan 8
- Bernilai baik pada variabel: 2, 3, 4, 7, 9, 10, dan 11

Kode	Indikator yang perlu perhatian	Indeks
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	40,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	40,00
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	36,36
20a	Alokasi anggaran pendidikan	41,16
20b	Alokasi anggaran kesehatan	47,81
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	20,00



KONTEKS BIROKRASI



1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah
2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, kurang proporsional)
3. Ketatalaksanaan atau *business process* (cenderung rumit dan belum semuanya menyusun SOP, SPM, SP)

Dihadapkan
Pada Tuntutan
Masyarakat
Terwujudnya Good
Governance dan
Pelayanan Prima

1. Tingginya in-efisiensi dalam belanja anggaran publik
2. Tingginya tingkat korupsi,
3. Dunia Usaha masih Korup
4. Pelayanan publik yg masih belum prima
5. Rendahnya daya saing

KONTEKS NASIONAL – DIMENSI PERIZINAN



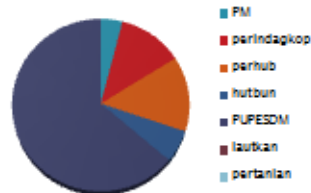
Arahan Presiden pada Rakor KP3MN

- ▶ Indonesia harus masuk ranking 40 dari 109(2015) dalam easy doing business tahun 2016.
- ▶ Penghapusan peraturan (perda dan pergub) yang menghambat investasi dan pelayanan perizinan.
- ▶ Pelayanan perizinan di daerah harus lebih cepat dan mudah hal ini akan dicek langsung oleh presiden.

Perizinan bidang Perekonomian dan Infrastruktur



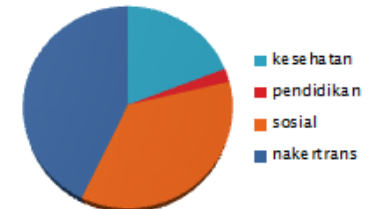
No	Sektor	Jumlah Izin
1	Penanaman Modal	32
2	Perindagkop	16
3	Perhubungan komunikasi dan informatika	123
4	Kehutanan dan perkebunan	3
5	PUPESDM	378
6	Kelautan dan perikanan	Masih dilaksanakan di dislautkan
7	Pertanian	0
JUMLAH		552



Perizinan Bid Soskesra



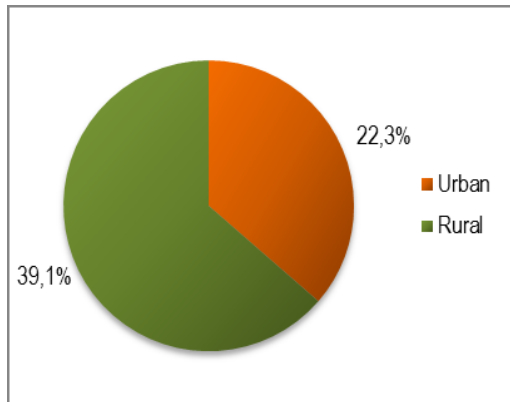
No	sektor	Jumlah Izin
1	Kesehatan	86
2	Pendidikan	2
3	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	136
4	Sosial	181
5	Lingkungan Hidup	Masih dilaksanakan BLH
6	Pembangunan	Masih dilaksanakan Biro Adpem
JUMLAH		405



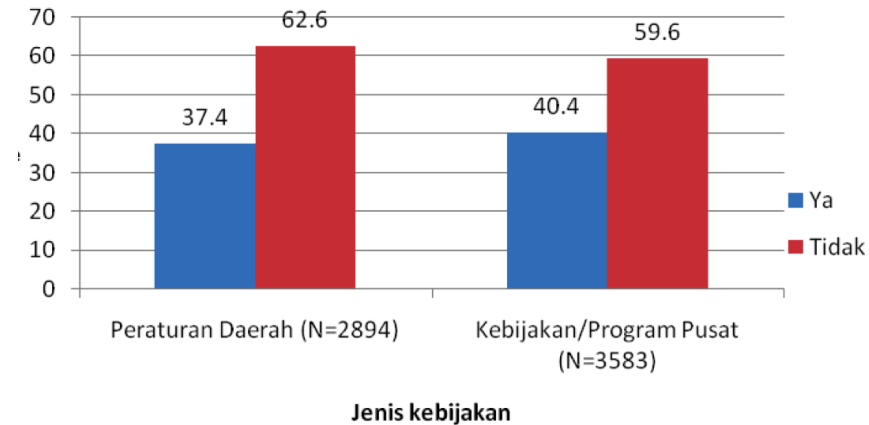
Catatan : masih 3 sektor yang masih melaksanakan pelayanan perizinan walaupun sudah dilimpahkan Gubernur ke gerai P2T

Perubahan Sosial & Dinamika Konflik

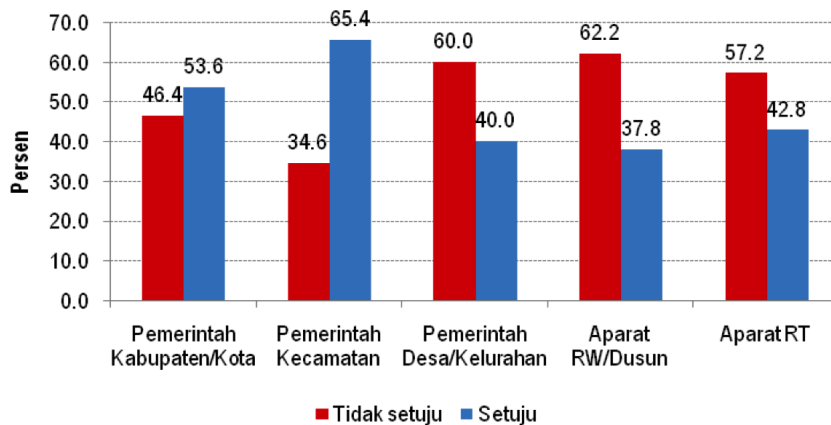
Kepercayaan Masy thdp Fungsi Representasi Partai Politik



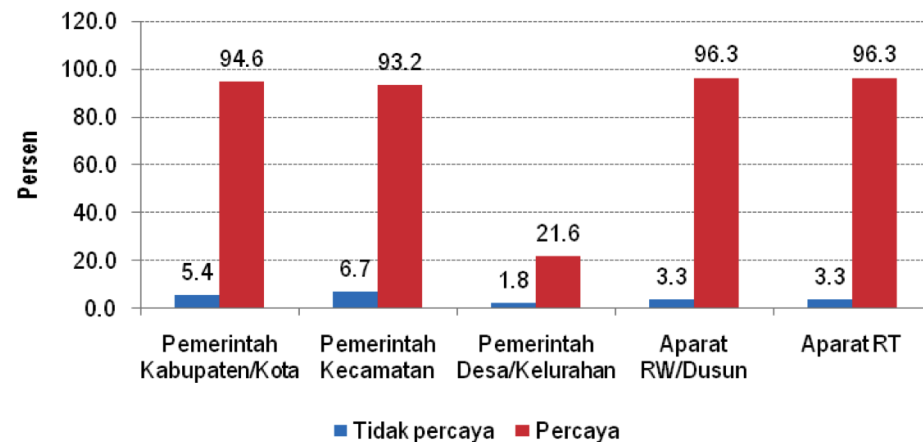
Persepsi Masy thdp Kebijakan Pem yg berpotensi Konflik



Keberterimaan thdp Pemimpin Pendetang



Kepuasan thdp Pelayanan Pemerintah



Sumber: data olah Bakesbanglinmas 2014

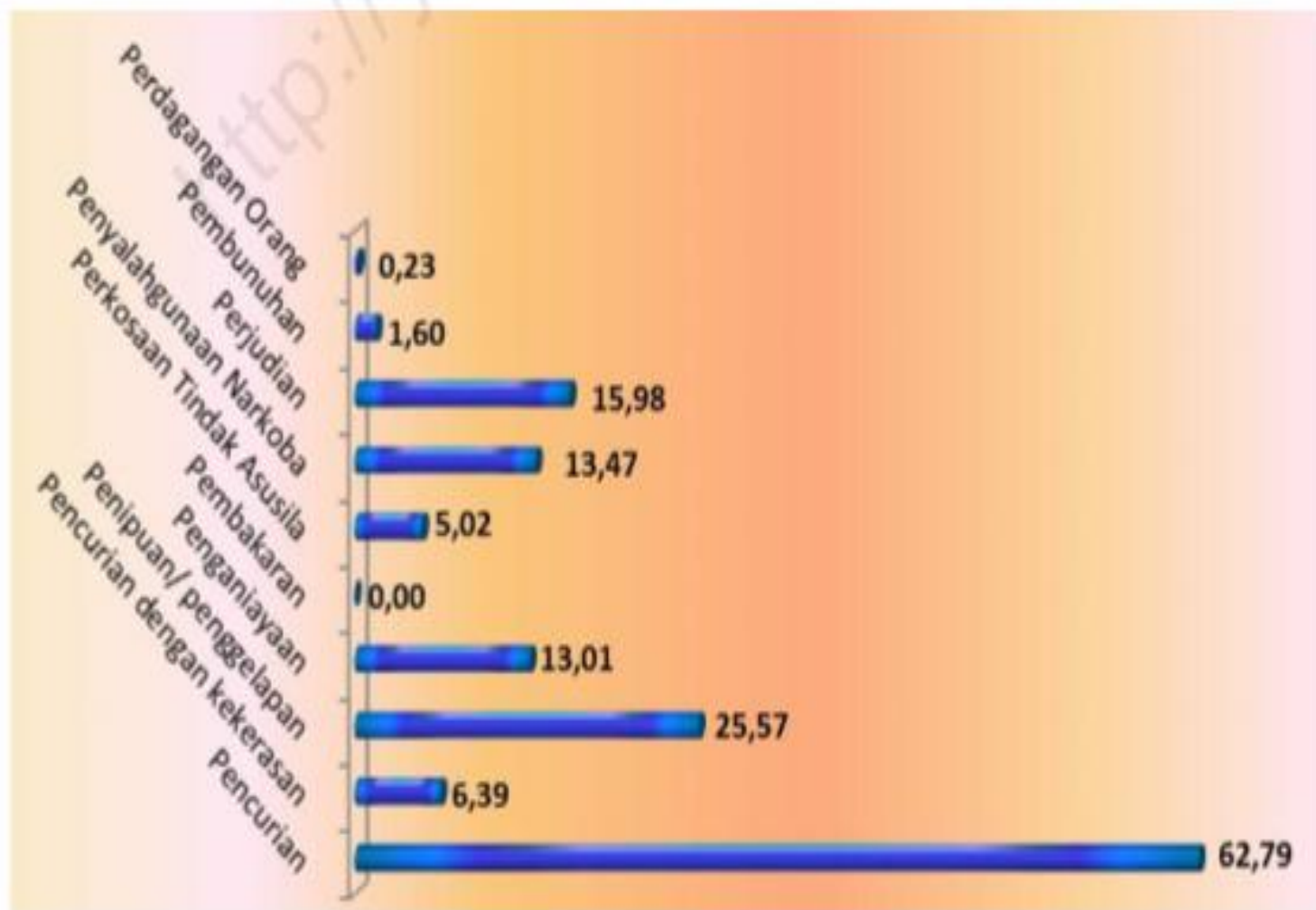
FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI DIY

TAHUN 2012 – 2015

Jenis Bencana	Bantul				Gunungkidul				Kulon Progo				Sleman				Yogyakarta			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Banjir	40	2	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2	0	2	7	0	0
Kekeringan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	14	12	1	3	84	18	7	5	216	1	1	3	8	3	1	2	0	1	2	0
Kebakaran Hutan/Lahan	1	8	5	4	16	0	3	1	6	3	0	2	8	2	4	7	2	5	2	7
Gempa Bumi	2	2	6	9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Angin Kencang	127	89	61	1	133	34	1	2	25	3	0	3	84	56	18	9	2	4	1	3
Epidermi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data Kejadian bencana di DIY pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, sementara pada tahun 2014 terdapat 122 bencana sedang tahun 2015 terdapat 65 kejadian bencana.

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta 2011



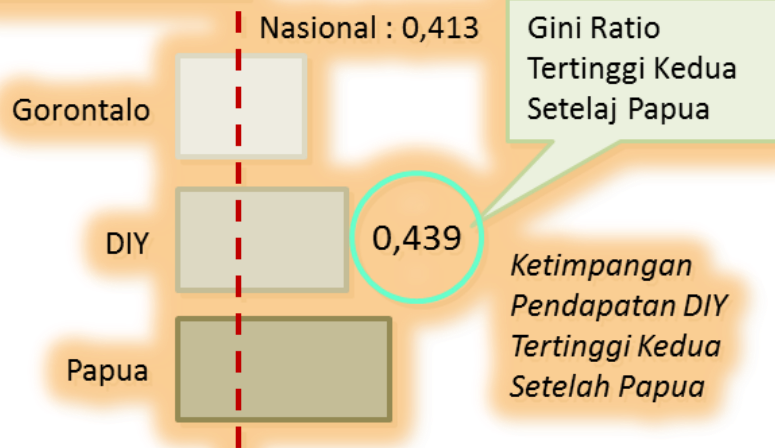
Sumber: Podes 2011

TEMATIK PEMBANGUNAN	STRATEGI PERENCANAAN
<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi regulasi penghambat investasi Evaluasi pelimpahan Perijinan dan Non Perijinan ke Kantor PTSP Pembangunan Kantor PTSP Pembangunan KPPD Inovasi pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Sosial dan Potensi Konflik 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian perubahan sosial dan potensi konflik Peta perubahan sosial dan potensi konflik Penegakan trantibum oleh Satpol PP Pengembangan Jagawarga Sinergi Satpol PP DIY, POLRI dan Satpol PP kab/kota, Kesbangpol Kab/Kota Kemitraan dengan NGO's dalam Rekayasa Sosial

TEMATIK PEMBANGUNAN	STRATEGI PERENCANAAN
<ul style="list-style-type: none">Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh oleh MasyarakatPembentukan dan pengembangan Sekolah Siaga bencanaPeningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan BencanaPeningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana
<ul style="list-style-type: none">Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none">Penyelesaian KTP gandaFasilitasi Akta Kelahiran Warga MiskinFasilitasi Akta Perkawinan Warga MiskinPengembangan Sistem Informasi Administrasi KependudukanUtilisasi Data KependudukanInovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

KETIMPANGAN

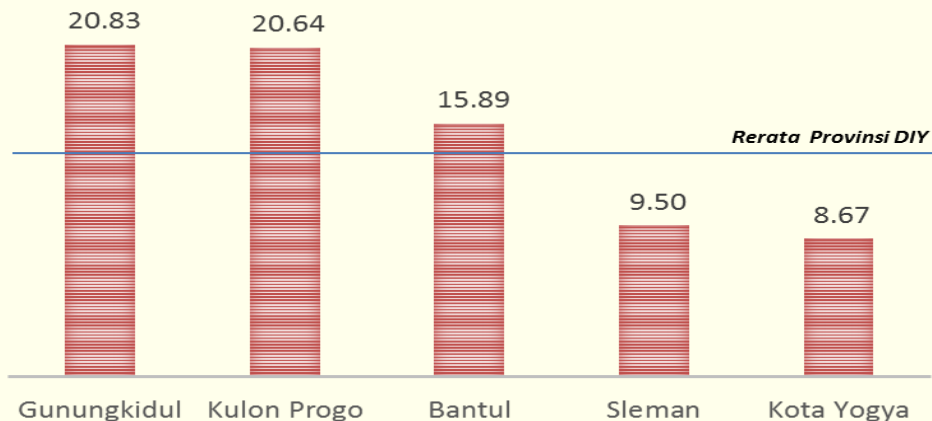
Gini Ratio



KEMISKINAN



TINGKAT KEMISKINAN KAB/KOTA SE-DIY :



Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa)
----------------	--------------------------------------

BANTUL	153,49
--------	--------

GUNUNGKIDUL	148,39
-------------	--------

SLEMAN	110,44
--------	--------

KULON PROGO	84,67
-------------	-------

KOTA YOGYAKARTA	35,60
-----------------	-------

PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Integrasi Pemerintahan



PENANGGULANGAN KETIMPANGAN:

Integrasi Pemerintahan

PENDORONG TERJADINYA KETIMPANGAN

KEBIJAKAN PUBLIK YANG MAMPU MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN

1. Kebijakan Afirmasi Alokasi Anggaran (Infrastruktur)
2. Identifikasi Kebijakan Yang Kontraproduktif thd Investasi
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
 1. Perijinan
 2. Kependudukan
4. Kesepakatan Politis Antar Pemerintah

1. Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan
2. Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi

REFORMASI BIROKRASI

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum (preventif dan represif)
2. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
3. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

PENINGKATAN AKSES

PELAYANAN PUBLIK DAN PERIJINAN MENDORONG INVESTASI

- Evaluasi regulasi penghambat investasi
- Evaluasi pelimpahan Perijinan dan Non Perijinan ke Kantor PTSP
- Pembangunan Kantor PTSP
- Inovasi pelayanan publik

BKPMD

Biro Hukum

Biro Tata
Pemerintahan

Biro Adm Perek
dan SDM

Kantor PTSP

Biro Organisasi

KETERKAITAN LINTAS SEKTOR

**PENGURANGAN BEBAN
MASYARAKAT MISKIN**

PENGURANGAN RESIKO BENCANA

- Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh oleh Masyarakat
- Pembentukan dan pengembangan Sekolah Siaga bencana
- Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana

SATPOL PP

DINAS
PUESDM

DINAS SOSIAL

BPBD

BIRO TATA PEMERINTAHAN

KETERKAITAN LINTAS SEKTOR

**PENGURANGAN BEBAN
MASYARAKAT MISKIN**

**PERUBAHAN SOSIAL
DAN POTENSI KONFLIK**

- Kajian dan perubahan sosial dan potensi konflik
- Pengembangan Jaga Warga
- Penegakan trantibum oleh Satpol PP
- Sinergi Antar Pihak, Kab/kota
- Kemitraan dengan NGO's dalam Rekayasa Sosial

SATPOL PP

NGO's

**Badan
Kesbangpol**

BIRO TATA PEMERINTAHAN

DINAS SOSIAL

KETERKAITAN LINTAS SEKTOR

**PENGURANGAN BEBAN
MASYARAKAT MISKIN**

**PENGURANGAN RESIKO
BENCANA**

- Penyelesaian KTP ganda
- Fasilitasi Akta Kelahiran Warga Miskin
- Fasilitasi Akta Perkawinan Warga Miskin
- Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Utilisasi Data Kependudukan
- Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

SATPOL PP



**DUKCAPIL
KAB/KOTA**



BPBD



BIRO TATA PEMERINTAHAN





CASCADE PENANGGULANGAN BENCANA



Isu Strategis	Strategi Respon	Arah Kebijakan	Pihak Terkait (dalam strategi kolaborasi)
Koordinasi antar wilayah, yurisdiksi dan komunikasi antar lembaga yang merespon bencana belum terpadu	Revitalisasi peran BPBD dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi para-pihak stakeholders PB	<ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi peran BPBD dalam kormonev para-pihak stakeholders PB;• Kormonev RPB dan RAD-PRB• Integrasi RPB dan RAD-PRB dalam Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA → Koordinasi Integrasi RPB dan RAD-PRB dalam Perencanaan Pembangunan• SKPD DIY, (PUP-ESDM, Disdikpora, Dinkes, Distan, Dishutbun, BLH, Dinsos, dll• BPBD Kab/Kota• Instansi Vertikal: TNI, POLRI, BMKG, BG, BIG, dll• Instansi Pusat: BNPB, Kemendagri, dll
Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana kurang memahami upaya PB	Meningkatkan PRB-BK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas)	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan dan pengembangan destana dan SSB• Mitigasi sosial dan struktural (fisik) dg prinsip "<i>build back better</i>"	
pengelolaan data dan informasi bencana belum optimal	Revitalisasi sistem informasi pengelolaan data dan informasi bencana	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi EWS dalam SI-PB• Optimalisasi utilisasi Pusdalops-PB BPBD• Kerjasama sharing informasi dengan lembaga lain yang mengelola data/info terkait PB	

- Memperluas kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO dan Ormas) yang bergerak pada isu PB & PRB-BK
- Adanya dana yang langsung ditransfer ke desa → arahan dan asistensi untuk PRB (Perencanaan Desa Berperspektif PRB)

ASPEK KEWILAYAHAN YANG FOKUS PADA KEMISKINAN DAN INFRASTRUKTUR 2017

PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pembentukan / Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

No	Kabupaten	kecamatan	Desa
1	Kulon Progo	Samigaluh	Ngargosari
2	Kulon Progo	Samigaluh	Banjarsari
3	Kulon Progo	Samigaluh	Pagerharjo
4	Kulon Progo	Kalibawang	Banjararum
5	Kulon Progo	Girimulyo	Pendoworejo
6	Kulon Progo	Kokap	Hargotirto
7	Kulon Progo	Kokap	Hargowilis
8	Kulon Progo	Sentolo	Sukoreno
9	Kulon Progo	Sentolo	Tuksono
1	Sleman	Tempel	Margorejo
2	Sleman	ngaglik	Srdomoharjo
3	Sleman	Seyegan	Margodadi
4	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani
5	Sleman	Berbah	Jogotirto
6	Sleman	Kalasan	Purwomartani

No	Kabupaten	kecamatan	Desa
1	Bantul	Imogiri	Karangtengah
2	Bantul	Imogiri	Girirejo
3	Bantul	Imogiri	Karang talun
4	Bantul	Jetis	Trimulyo
5	Bantul	Dlingo	Terong
6	Bantul	Sedayu	Argorejo
1	Gunung Kidul	Patuk	Beji
2	Gunung Kidul	Patuk	Bunder
3	Gunung Kidul	Patuk	Ngoro oro
4	Gunung Kidul	Gendangsari	Sampang
5	Gunung Kidul	Gendangsari	Serut
6	Gunung Kidul	Wonosari	Mulo
7	Gunung Kidul	Wonosari	Karang Tengah
8	Gunung Kidul	Wonosari	Gari
9	Gunung Kidul	Ngawen	Watusigar
10	Gunung Kidul	Ngelipar	Nglipar
11	Gunung Kidul	Ngelipar	Pulungrejo
12	Gunung Kidul	Playen	Karang Duwet
13	Gunung Kidul	Pojong	Gombong
14	Gunung Kidul	Saptosari	Kanigoro
15	Gunung Kidul	Semin	Pundongsari
16	Gunung Kidul	Karangmojo	Ngawis



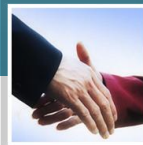
ASPEK KEWILAYAHAN YANG FOKUS PADA KEMISKINAN DAN INFRASTRUKTUR 2017

PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pembentukan / Pengembangan Sekolah Siaga Bencana (SSB)

No	Kecamatan	Kecamatan	SSB	Keterangan
1	Kulon Progo	Kokap	SDN Trisik	Pengembangan SSB
2	Kulon Progo	Kokap	SDN 1 Pripih	SSB Rintisan
3	Sleman	Ngemplak	SDN Kejambon 1	Pengembangan SSB
4	Gunung Kidul	Gendang Sari	SDN Buyotan	Pengembangan SSB
5	Gunung Kidul	Patok	SMA Negri 1	SSB Rintisan
6	Bantul	Dlinggo	SMP Negri 2	SSB Rintisan





“ലാഭമുണ്ടാകട്ടെ”